

Merasa Ditipu soal Honor yang Tidak Sesuai

Dukuh Keluhkan Kurangnya Transparansi dalam Pendataan Kendaraan

KULON PROGO - Program pendataan kendaraan bermotor yang digagas oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Samsat Kulon Progo menuai keluhan dari para dukuh. Banyak dukuh yang terlibat langsung dalam program ini, namun tak diberi honor yang sesuai dan tidak transparan.

Kepala BKAD Kulon Progo Taufiq Amrullah membenarkan adanya program pendataan kendaraan bermotor. Tujuan dari program ini adalah untuk memeriksa kondisi kendaraan yang telah membayar pajak lebih dari setahun.

Petugas yang ditunjuk untuk pendataan ini akan memeriksa kondisi kendaraan dan hak milik dari kendaraan yang terdaftar. Setiap petugas akan diberikan lembaran pendataan.

"Petugas yang ditunjuk sudah berdasarkan SK, satu kalurahan satu petugas," ucap Taufiq, kemarin (28/2).

Taufiq menjelaskan, petugas pendataan biasanya merupakan pamong kalurahan, yang menerima honor sebesar Rp 8 ribu untuk setiap lembar pendataan yang dikembalikan. Rata-rata, setiap kalurahan memiliki sekitar 300 kendaraan yang telah membayar pajak.

Namun, kenyataannya banyak petugas yang tidak menjalankan tugas mereka secara langsung dan malah mengalihkan pekerjaan tersebut kepada para dukuh di setiap kalurahan.

"Akhirnya yang menjalankan tugas itu dukuh, petugas bermodus meminta tolong," ucap salah satu dukuh



ANOM BAGASKORO/RADAR JOGJA

TAAT: Warga membayar pajak tahunan kendaraan di Samsat keliling di Kulon Progo.

yang tak mau namanya dikorbankan. Meskipun dukuh terlibat dalam pendataan tanpa memikirkan honor karena melakukan tugas bagian dari kalurahan. Pada 2024 mereka mulai mengetahui besaran honor yang seharusnya mereka terima.

Hal ini menyebabkan kekecewaan di kalangan dukuh dan mereka merasa ditipu. Sebab nilai besaran honor dari pendataan tak sesuai dari kenyataan. Padahal mereka telah menggantikan tugas dari petugas pendataan. "Bukan hanya saya saja, beberapa dukuh juga kecewa," ucapnya. Keluhan tersebut berakar pada ke-

tidaktransparanan dalam pembagian honor antara petugas dan dukuh. Padahal, para dukuh memainkan peran penting dalam proses pendataan yang berlangsung di lapangan.

Pun beberapa dukuh yang mendapat honor kurang dari Rp 8 ribu juga mengeluhkan hal yang sama.

Dia berharap agar BKAD dan Samsat Kulon Progo mengkaji ulang program pendataan ini. Mereka menyarankan agar tugas tersebut lebih baik diserahkan langsung kepada dukuh, mengingat mereka yang lebih banyak terlibat di lapangan daripada petugas yang sebenarnya. (gas/wia/fj)

DATA GRAFIS BKAD KULON PROGO

- Target kendaraan menunggak pajak 20 ribu kendaraan.
- 1 petugas disiapkan untuk 1 kalurahan
- Satu lembar pendataan diganti honor Rp 8 ribu
- Banyak dukuh yang tak menerima honor itu.
- Beberapa dukuh juga tak menerima honor pendataan penuh. Di antaranya dukuh di Kalurahan Karangsewu, Kulur, dan Gerbosari.